

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara untuk mencari, memperoleh, menyimpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian survey.

Sugiyono (2014:7) mendefinisikan penelitian survey sebagai berikut:

“Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian *relative*, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.”

Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat jika menggunakan sampel yang *representatif* (mewakili).

Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penulis melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dan metode asosiatif.

Menurut Sugiyono (2014:53) definisi metode deskriptif sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.”

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

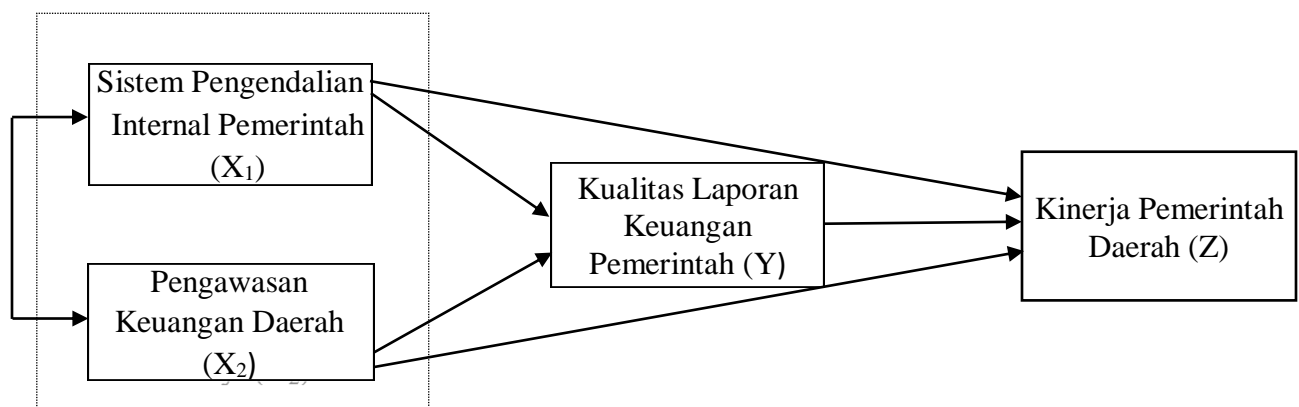
Selanjutnya Sugiyono (2014:55) mendeskripsikan metode asosiatif sebagai berikut:

“Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”

Pada penelitian ini, metode asosiatif digunakan untuk menguji apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, serta melakukan pengujian apakah hipotesis yang telah ditentukan dapat diterima atau ditolak.

3.1.3 Model Penelitian

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yang penulis kemukakan yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”, maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan pengertian yang berarti ganda. Definisi variabel juga memberikan batasan sejauh mana penelitian yang akan dilakukan. Operasional variabel diperlukan untuk mengubah masalah yang diteliti ke dalam bentuk variabel, kemudian menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait.

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian adalah:

“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Variabel dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua variabel utama yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen), serta terdapat variabel pembantu lainnya yaitu variabel *intervening*. Pada penelitian ini, sesuai dengan judul penelitian yang penulis gunakan yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”, maka penulis mengelompokkan variabel-variabel penelitian tersebut menjadi tiga kelompok yaitu variabel bebas (variabel independen) yang terdiri atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah, kemudian variabel penghubung (variabel *intervening*) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, dan variabel terikat (variabel dependen) yaitu Kinerja

Pemerintah Daerah. Definisi dari variabel-variabel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah:

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen dinotasikan sebagai X.

Adapun variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 (Pasal 1) Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Indra Bastian (2007:7):

“Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.”

b. Pengawasan Keuangan Daerah (X_2)

Permendagri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengatur bahwa:

“Pengawasan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Abdul Halim (2012:146):

“Pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, serta sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.”

2. Variabel *Intervening* atau Variabel Penghubung

Menurut Sugiyono (2017:40) definisi variabel *intervening* sebagai berikut:

“Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *intervening* dinotasikan sebagai Y. Adapun variabel *intervening* dalam penelitian ini yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Menurut Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston yang dialihbahasakan oleh Sam Setyautama (2008):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah idealnya laporan keuangan mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja organisasi pemerintah. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

Selain itu menurut Indra Bastian (2010:9):

“Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna dan berkualitas untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

3. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel dependen adalah:

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen dinotasikan sebagai Z.

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut Mohammad Mahsun (2006:4):

“Kinerja pemerintah daerah adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.”

Selain itu menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009:121):

“Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan pencapaian

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu, operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” maka terdapat empat (4) variabel penelitian:

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Independen (X_1)
2. Pengawasan Keuangan Daerah sebagai Variabel Independen (X_2)
3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai Variabel *Intervening* (Y)
4. Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Dependen (Z)

Agar lebih mudah untuk melihat variabel penelitian yang digunakan, maka penulis menjabarkannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Independen (X_1): Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<p>Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X_1)</p> <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 (Pasal 1) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian <ol style="list-style-type: none"> a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 	Ordinal	1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10

	3. Kegiatan pengendalian	a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan		11
		b. Pembinaan sumber daya manusia		12
		c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi		13
		d. Pengendalian fisik atas aset		14
		e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja		15
		f. Pemisahan fungsi		16
		g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting	Ordinal	17
		h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian		18
		i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya		19
		j. Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya		20
		k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting		21
	4. Informasi dan komunikasi	a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi		22
		b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus	Ordinal	23

	5. Pemantauan pengendalian intern	a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi terpisah c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya	Ordinal	24 25 26
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 (Pasal 1) Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Independen (X₂): Pengawasan Keuangan Daerah

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pengawasan Keuangan Daerah (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> Proses Pengawasan Keuangan Daerah: 			
Pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, serta sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.	1. Perencanaan dan Penganggaran	a. Keterlibatan Dewan dalam penetapan arah dan kebijakan umum APBD b. Keterlibatan Dewan dalam penetapan alokasi serta distribusi sumber daya c. APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Ordinal	1 2 3
Abdul Halim (2012:146)				

	2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah	a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)	Ordinal	4
		b. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah		5
		c. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)		6
		d. Peran Dewan atas evaluasi pada laporan bulanan		7
	3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah	Ordinal	8
		b. Penyelenggaraan akuntansi oleh SKPD		9
		c. Laporan keuangan daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan		10
		d. Pernyataan Dewan apabila terjadi kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban keuangan daerah		11

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel *Intervening* (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item				
<p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)</p> <p>Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah idealnya laporan keuangan mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja organisasi pemerintah. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambaran yang disajikan lewat data <i>financial</i>, dan semakin mendekati kebenaran.</p> <p>Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston yang dialihbahasakan oleh Sam Setyautama (2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah: 							
					1. Relevan	a. Memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>)	Ordinal	1
						b. Memiliki manfaat prediktif (<i>predictive value</i>)		2
						c. Tepat waktu		3
						d. Lengkap		4
					2. Andal	a. Penyajian jujur	Ordinal	5
						b. Dapat diverifikasi (<i>verifiability</i>)		6
						c. Netralitas		7
					3. Dapat dibandingkan	a. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	Ordinal	8
						b. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain		9
4. Dapat dipahami	a. Laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna		10					

	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	b. Laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	Ordinal	11
--	---	---	---------	----

Tabel 3.4

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Z): Kinerja Pemerintah Daerah

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item		
<p>Kinerja Pemerintah Daerah (Z)</p> <p>Kinerja pemerintah daerah adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.</p> <p>Mohammad Mahsun (2006:4)</p>	<p>• Indikator Kinerja Pemerintah Daerah:</p> <p>1. Ekonomis</p> <p>2. Efisiensi</p> <p>3. Efektifitas</p> <p>Mohammad Mahsun (2012:181)</p>	a. Pengelolaan secara hati-hati	Ordinal	1		
		b. Tidak ada pemborosan		2		
		c. Menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu		3		
				a. Menggunakan perbandingan antara <i>output</i> dan <i>input</i>	Ordinal	4
				b. Penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya		5
				a. Pencapaian target kebijakan	Ordinal	6
				b. Mencapai sasaran akhir kebijakan		7

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis.

Menurut Sugiyono (2017:80) definisi populasi sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada dalam suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 15 SKPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung. Sedangkan unit observasi atau pengamatan dalam penelitian ini adalah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Sub Bagian Keuangan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Sub Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

Dari uraian di atas, maka jumlah populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Populasi Penelitian SKPD Kabupaten Bandung

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai pada Sub Bagian Keuangan
1.	Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung	12
2.	Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bandung	6
3.	Dinas Pangan dan Perikanan (DISPAKAN) Kabupaten Bandung	6
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bandung	10
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung	8
6.	Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Bandung	10
7.	Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Bandung	9
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DISKOP – UKM) Kabupaten Bandung	7
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERIN) Kabupaten Bandung	11
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Bandung	9
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Bandung	8
12.	Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Bandung	6
13.	Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	9
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	9
15.	Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bandung	5
Total Sub Bagian Keuangan		125 Orang

Tabel 3.6
Populasi Penelitian DPRD Kabupaten Bandung

No.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Anggota Dewan
1.	Komisi A Bidang Pemerintahan	7
2.	Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan	9
3.	Komisi C Bidang Pembangunan	8
4.	Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat	10
Total Anggota Dewan		34 Orang

3.3.2 Teknik *Sampling*

Menurut Sugiyono (2017:81):

“Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability sampling* dan *Nonprobability sampling*.”

Menurut Sugiyono (2017:82) definisi *Probability sampling* sebagai berikut:

“*Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah).”

Selain itu Sugiyono (2017:84) mendefinisikan *Nonprobability sampling* sebagai berikut:

“*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling* sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.”

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan oleh penulis adalah teknik *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:82):

“Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.”

3.3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Sub Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. Untuk menentukan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman dari Suharsimi Arikunto. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010:112), jika subyeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subyeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Dalam hal ini pengambilan sampel penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, penulis mengambil semua populasi (subyek) nya karena kurang

dari 100 orang. Sedangkan pengambilan sampel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, penulis tidak mengambil semua populasi (subyek) nya karena lebih dari 100 orang.

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, penulis menggunakan batas kesalahan sebesar 25% karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%. Semakin besar tingkat kesalahan, maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 125 pegawai, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= N \times e \\ &= 125 \times 25\% \\ &= 31,25 \text{ atau } 32 \text{ (Minimal)} \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas kesalahan yang ditoleransi dalam pengambilan sampel (25%)

Berdasarkan perhitungan tersebut, anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel minimal sebanyak 32 pegawai. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 38 pegawai. Adapun penyebaran sampel dalam penelitian ini ditujukan kepada pegawai Sub Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7**Penyebaran Sampel Penelitian**

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Populasi	Perhitungan	Distribusi Sampel
1.	Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung	12	$n = 12 \times 25\% = 3$	3
2.	Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bandung	6	$n = 6 \times 25\% = 1,5$	2
3.	Dinas Pangan dan Perikanan (DISPAKAN) Kabupaten Bandung	6	$n = 6 \times 25\% = 1,5$	2
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bandung	10	$n = 10 \times 25\% = 2,5$	3
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung	8	$n = 8 \times 25\% = 2$	2
6.	Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Bandung	10	$n = 10 \times 25\% = 2,5$	3
7.	Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Bandung	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (DISKOP – UKM) Kabupaten Bandung	7	$n = 7 \times 25\% = 1,75$	2
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISPERIN) Kabupaten Bandung	11	$n = 11 \times 25\% = 2,75$	3
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Bandung	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
11.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) Kabupaten Bandung	8	$n = 8 \times 25\% = 2$	2

12.	Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Bandung	6	$n = 6 \times 25\% = 1,5$	2
13.	Dinas Pertanian Kabupaten Bandung	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung	9	$n = 9 \times 25\% = 2,25$	3
15.	Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kabupaten Bandung	5	$n = 5 \times 25\% = 1,25$	2
Jumlah		125		38

Berdasarkan penyebaran sampel penelitian tersebut, maka jumlah pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini (n) diambil sebanyak 38 pegawai.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Menurut Sugiyono (2017:137) “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para pegawai Sub Bagian Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.”

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung melibatkan pihak responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Teknik penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah kuesioner yaitu dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden, sehingga diperoleh data penelitian yang dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

Menurut Sugiyono (2017:142):

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

3.5 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Rancangan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Data yang terhimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara

data yang di lapangan dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017:147) analisis data adalah:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Dalam kegiatan menganalisis data, langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Membuat kuesioner

Penulis membuat kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan yang akan diberikan dan diisi langsung oleh responden. Untuk mendapatkan tingkat tanggapan responden yang tinggi, kuesioner yang diajukan sangat jelas.

2. Membagikan dan mengumpulkan kuesioner

Daftar kuesioner kemudian disebarkan ke bagian-bagian yang telah ditetapkan, kemudian dikumpulkan kembali kuesioner tersebut yang telah diisi oleh responden.

3. Memberikan skor

Untuk menentukan nilai dari kuesioner tersebut, penulis menggunakan *skala likert*. Setiap item dari kuesioner tersebut merupakan pertanyaan positif yang memiliki lima (5) jawaban dengan masing-masing nilai atau skor yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan kriteria atau bobot penilaian dari setiap pertanyaan

dalam kuesioner yang dijawab oleh responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8
Bobot Penilaian untuk Jawaban Kuesioner

No.	Pilihan Jawaban	Skor Jawaban
1.	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5
2.	Setuju/Sering/Sesuai	4
3.	Kurang Setuju/Kadang-kadang/Cukup Sesuai	3
4.	Tidak Setuju/Jarang/Kurang Sesuai	2
5.	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak Sesuai	1

4. Menjumlahkan dan Menetapkan kriteria untuk masing masing variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik untuk menilai variabel X, variabel Y, dan variabel Z, maka analisis yang digunakan berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata (*mean*) ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus nilai rata-rata (*mean*) yang terdapat dalam statistik untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk Variabel X

$$Me = \frac{\sum Xi}{n}$$

Untuk Variabel Y

$$Me = \frac{\sum Yi}{n}$$

Untuk Variabel Z

$$Me = \frac{\sum Zi}{n}$$

Keterangan:

Me = Rata-rata

$\sum Xi$ = Jumlah nilai X ke- i sampai ke- n

$\sum Yi$ = Jumlah nilai Y ke- i sampai ke- n

$\sum Zi$ = Jumlah nilai Z ke- i sampai ke- n

n = Jumlah responden yang akan dirata-rata

Setelah diperoleh rata-rata dari setiap variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing penulis ambil dari banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan nilai terendah satu (1) dan nilai tertinggi lima (5) dengan menggunakan *skala likert* yang telah penulis tetapkan. Teknik *skala likert* digunakan penulis untuk mengukur jawaban kuesioner.

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Variabel X_1)

Kriteria sistem pengendalian internal pemerintah (variabel X_1) yang terdiri dari dua puluh enam (26) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 26 = 26$

Nilai tertinggi: $5 \times 26 = 130$

Panjang kelas interval: $\frac{(130-26)}{5} = 20,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan kriteria sistem pengendalian internal pemerintah (variabel X_1) sebagai berikut:

Tabel 3.9**Kriteria Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Variabel X₁)**

Rentang Nilai	Kriteria
26 – 46,8	Tidak Memadai
46,8 – 67,6	Kurang Memadai
67,6 – 88,4	Cukup Memadai
88,4 – 109,2	Memadai
109,2 – 130	Sangat Memadai

Pedoman kategorisasi dari dimensi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Pedoman kategorisasi lingkungan pengendalian yang terdiri dari delapan (8) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 8 \times 38 = 304$

Nilai tertinggi: $5 \times 8 \times 38 = 1520$

Panjang kelas interval: $\frac{(1520-304)}{5} = 243,2$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi lingkungan pengendalian sebagai berikut:

Tabel 3.10**Pedoman Kategorisasi Lingkungan Pengendalian**

Rentang Nilai	Kriteria
304 – 547,2	Tidak Memadai
547,2 – 790,4	Kurang Memadai
790,4 – 1033,6	Cukup Memadai
1033,6 – 1276,8	Memadai
1276,8 – 1520	Sangat Memadai

b. Penilaian Risiko

Pedoman kategorisasi penilaian risiko yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi penilaian risiko sebagai berikut:

Tabel 3.11**Pedoman Kategorisasi Penilaian Risiko**

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Memadai
136,8 – 197,6	Kurang Memadai

197,6 – 258,4	Cukup Memadai
258,4 – 319,2	Memadai
319,2 – 380	Sangat Memadai

c. Kegiatan Pengendalian

Pedoman kategorisasi kegiatan pengendalian yang terdiri dari sebelas (11) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 11 \times 38 = 418$

Nilai tertinggi: $5 \times 11 \times 38 = 2090$

Panjang kelas interval: $\frac{(2090-418)}{5} = 334,4$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi kegiatan pengendalian sebagai berikut:

Tabel 3.12

Pedoman Kategorisasi Kegiatan Pengendalian

Rentang Nilai	Kriteria
418 – 752,4	Tidak Memadai
752,4 – 1086,8	Kurang Memadai
1086,8 – 1421,2	Cukup Memadai
1421,2 – 1755,6	Memadai
1755,6 – 2090	Sangat Memadai

d. Informasi dan Komunikasi

Pedoman kategorisasi informasi dan komunikasi yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi informasi dan komunikasi sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pedoman Kategorisasi Informasi dan Komunikasi

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Memadai
136,8 – 197,6	Kurang Memadai
197,6 – 258,4	Cukup Memadai
258,4 – 319,2	Memadai
319,2 – 380	Sangat Memadai

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pedoman kategorisasi pemantauan pengendalian intern yang terdiri dari tiga (3) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 3 \times 38 = 114$

Nilai tertinggi: $5 \times 3 \times 38 = 570$

Panjang kelas interval: $\frac{(570-114)}{5} = 91,2$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi pemantauan pengendalian intern sebagai berikut:

Tabel 3.14

Pedoman Kategorisasi Pemantauan Pengendalian Intern

Rentang Nilai	Kriteria
114 – 205,2	Tidak Memadai
205,2 – 296,4	Kurang Memadai
296,4 – 387,6	Cukup Memadai
387,6 – 478,8	Memadai
478,8 – 570	Sangat Memadai

2. Pengawasan Keuangan Daerah (Variabel X₂)

Kriteria pengawasan keuangan daerah (variabel X₂) yang terdiri dari sebelas (11) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 11 = 11$

Nilai tertinggi: $5 \times 11 = 55$

Panjang kelas interval: $\frac{(55-11)}{5} = 8,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan kriteria pengawasan keuangan daerah (variabel X₂) sebagai berikut:

Tabel 3.15**Kriteria Pengawasan Keuangan Daerah (Variabel X₂)**

Rentang Nilai	Kriteria
11 – 19,8	Tidak Baik
19,8 – 28,6	Kurang Baik
28,6 – 37,4	Cukup Baik
37,4 – 46,2	Baik
46,2 – 55	Sangat Baik

Pedoman kategorisasi dari dimensi variabel Pengawasan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Pedoman kategorisasi perencanaan dan penganggaran yang terdiri dari tiga (3) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 3 \times 30 = 90$

Nilai tertinggi: $5 \times 3 \times 30 = 450$

Panjang kelas interval: $\frac{(450-90)}{5} = 72$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi perencanaan dan penganggaran sebagai berikut:

Tabel 3.16**Pedoman Kategorisasi Perencanaan dan Penganggaran**

Rentang Nilai	Kriteria
90 – 162	Tidak Baik
162 – 234	Kurang Baik
234 – 306	Cukup Baik
306 – 378	Baik
378 – 450	Sangat Baik

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pedoman kategorisasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang terdiri dari empat (4) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 4 \times 30 = 120$

Nilai tertinggi: $5 \times 4 \times 30 = 600$

Panjang kelas interval: $\frac{(600-120)}{5} = 96$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.17**Pedoman Kategorisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah**

Rentang Nilai	Kriteria
120 – 216	Tidak Baik

216 – 312	Kurang Baik
312 – 408	Cukup Baik
408 – 504	Baik
504 – 600	Sangat Baik

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pedoman kategorisasi pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari empat

(4) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 4 \times 30 = 120$

Nilai tertinggi: $5 \times 4 \times 30 = 600$

Panjang kelas interval: $\frac{(600-120)}{5} = 96$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.18

Pedoman Kategorisasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Rentang Nilai	Kriteria
120 – 216	Tidak Baik
216 – 312	Kurang Baik
312 – 408	Cukup Baik
408 – 504	Baik
504 – 600	Sangat Baik

3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Variabel Y)

Kriteria kualitas laporan keuangan pemerintah (Variabel Y) yang terdiri dari sebelas (11) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 11 = 11$

Nilai tertinggi: $5 \times 11 = 55$

Panjang kelas interval: $\frac{(55-11)}{5} = 8,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan kriteria kualitas laporan keuangan pemerintah (Variabel Y) sebagai berikut:

Tabel 3.19

Kriteria Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Variabel Y)

Rentang Nilai	Kriteria
11 – 19,8	Tidak Berkualitas
19,8 – 28,6	Kurang Berkualitas
28,6 – 37,4	Cukup Berkualitas
37,4 – 46,2	Berkualitas
46,2 – 55	Sangat Berkualitas

Pedoman kategorisasi dari dimensi variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, sebagai berikut:

a. Relevan

Pedoman kategorisasi relevan yang terdiri dari empat (4) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 4 \times 38 = 152$

Nilai tertinggi: $5 \times 4 \times 38 = 760$

Panjang kelas interval: $\frac{(760-152)}{5} = 121,6$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi relevan sebagai berikut:

Tabel 3.20

Pedoman Kategorisasi Relevan

Rentang Nilai	Kriteria
152 – 273,6	Tidak Berkualitas
273,6 – 395,2	Kurang Berkualitas
395,2 – 516,8	Cukup Berkualitas
516,8 – 638,4	Berkualitas
638,4 – 760	Sangat Berkualitas

b. Andal

Pedoman kategorisasi andal yang terdiri dari tiga (3) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 3 \times 38 = 114$

Nilai tertinggi: $5 \times 3 \times 38 = 570$

Panjang kelas interval: $\frac{(570-114)}{5} = 91,2$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi andal sebagai berikut:

Tabel 3.21**Pedoman Kategorisasi Andal**

Rentang Nilai	Kriteria
114 – 205,2	Tidak Berkualitas
205,2 – 296,4	Kurang Berkualitas
296,4 – 387,6	Cukup Berkualitas
387,6 – 478,8	Berkualitas
478,8 – 570	Sangat Berkualitas

c. **Dapat Dibandingkan**

Pedoman kategorisasi dapat dibandingkan yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi dapat dibandingkan sebagai berikut:

Tabel 3.22**Pedoman Kategorisasi Dapat Dibandingkan**

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Berkualitas

136,8 – 197,6	Kurang Berkualitas
197,6 – 258,4	Cukup Berkualitas
258,4 – 319,2	Berkualitas
319,2 – 380	Sangat Berkualitas

d. Dapat Dipahami

Pedoman kategorisasi dapat dipahami yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 3.23

Pedoman Kategorisasi Dapat Dipahami

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Berkualitas
136,8 – 197,6	Kurang Berkualitas
197,6 – 258,4	Cukup Berkualitas
258,4 – 319,2	Berkualitas
319,2 – 380	Sangat Berkualitas

4. Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Z)

Kriteria kinerja pemerintah daerah (Variabel Z) yang terdiri dari tujuh (7) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 7 = 7$

Nilai tertinggi: $5 \times 7 = 35$

Panjang kelas interval: $\frac{(35-7)}{5} = 5,6$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan kriteria kinerja pemerintah daerah (Variabel Z) sebagai berikut:

Tabel 3.24

Kriteria Kinerja Pemerintah Daerah (Variabel Z)

Rentang Nilai	Kriteria
7 – 12,6	Tidak Baik
12,6 – 18,2	Kurang Baik
18,2 – 23,8	Cukup Baik
23,8 – 29,4	Baik
29,4 – 35	Sangat Baik

Pedoman kategorisasi dari dimensi variabel Kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

a. Ekonomis

Pedoman kategorisasi ekonomis yang terdiri dari tiga (3) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 3 \times 38 = 114$

Nilai tertinggi: $5 \times 3 \times 38 = 570$

Panjang kelas interval: $\frac{(570-114)}{5} = 91,2$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi ekonomis sebagai berikut:

Tabel 3.25

Pedoman Kategorisasi Ekonomis

Rentang Nilai	Kriteria
114 – 205,2	Tidak Baik
205,2 – 296,4	Kurang Baik
296,4 – 387,6	Cukup Baik
387,6 – 478,8	Baik
478,8 – 570	Sangat Baik

b. Efisiensi

Pedoman kategorisasi efisiensi yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.26**Pedoman Kategorisasi Efisiensi**

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Baik
136,8 – 197,6	Kurang Baik
197,6 – 258,4	Cukup Baik
258,4 – 319,2	Baik
319,2 – 380	Sangat Baik

c. Efektifitas

Pedoman kategorisasi efektifitas yang terdiri dari dua (2) pertanyaan, yaitu:

Nilai terendah: $1 \times 2 \times 38 = 76$

Nilai tertinggi: $5 \times 2 \times 38 = 380$

Panjang kelas interval: $\frac{(380-76)}{5} = 60,8$.

Berdasarkan perhitungan tersebut, penulis menetapkan pedoman kategorisasi efektifitas sebagai berikut:

Tabel 3.27**Pedoman Kategorisasi Efektifitas**

Rentang Nilai	Kriteria
76 – 136,8	Tidak Baik
136,8 – 197,6	Kurang Baik

197,6 – 258,4	Cukup Baik
258,4 – 319,2	Baik
319,2 – 380	Sangat Baik

3.5.1.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya.

Sugiyono (2017:121) menyatakan bahwa:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item yaitu dengan mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari setiap skor butir. Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\} \{n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi *Pearson Product Moment*

X_i = Variabel independen (variabel bebas)

Y_i = Variabel dependen (variabel terikat)

n = Jumlah responden

$\sum X_i Y_i$ = Jumlah perkalian variabel bebas dan variabel terikat

Menurut Sugiyono (2017:126) kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Jika $r \geq 0,30$ maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika $r \leq 0,30$ maka item instrumen dinyatakan tidak valid

3.5.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, penulis menggunakan koefisien *cronbach's alpha* dengan menggunakan fasilitas *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari batasan yang ditentukan yaitu 0,60 atau korelasi hasil perhitungan lebih besar daripada nilai dalam tabel dan dapat digunakan untuk penelitian, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2} \right)$$

Keterangan:

α = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum Si$ = Jumlah skor tiap item

Si = Varians total

3.5.1.3 Metode Transformasi Data

Data penelitian yang dikumpulkan melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah terlebih dahulu dilakukan transformasi data. Transformasi data dimaksudkan untuk mengubah suatu skala pengukuran ke dalam skala pengukuran yang lebih tinggi tingkatannya. Transformasi yang dimaksud adalah mengubah data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala interval. Metode yang digunakan untuk melakukan transformasi data tersebut adalah *Method of Successive Interval* (MSI). Menurut Sugiyono (2014) langkah-langkah menggunakan MSI adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan.
2. Pada setiap butir pertanyaan tentukan *frekuensi* (f) responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item pertanyaan.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.
5. Menentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal.

6. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas.
7. Menghitung nilai skala (*scale value*) untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus:

$$\text{Scale Value} = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at upper limit}}{\text{Area below upper limit} - \text{Area below lower limit}}$$

Keterangan:

- Density at lower limit* = Kepadatan batas bawah
Density at upper Limit = Kepadatan batas atas
Area below upper Limit = Daerah di bawah batas atas
Area below lower Limit = Daerah di bawah batas bawah

8. Menghitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban menggunakan rumus berikut:

$$\text{Transformed Scale Value} = \text{Scale Value} + (1 + \text{Scale Value Minimum})$$

3.5.1.4 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan secara umum dan dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna.

Menurut Imam Ghozali (2013:19):

“Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diteliti. Dalam menggunakan statistik deskriptif, suatu data dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skeweness*. Statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah ciri-ciri karakteristik suatu kelompok data agar mudah dipahami.”

Menurut Sugiyono (2017:147):

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Selain itu Sugiyono (2017:148) menyatakan bahwa:

“Termasuk dalam analisis deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dalam analisis deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.”

3.5.1.5 Analisis Asosiatif

Menurut Ahmad Qurtubi (2008:46):

“Penelitian asosiatif didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.”

Menurut Muhammad Fauzi (2009:155):

“Analisis asosiatif adalah hubungan antara dua variabel yang tidak saling mengikat, tetapi lebih mengarah pada bentuk kerjasamanya.”

Selain itu Sugiyono (2014:55) menyatakan bahwa:

“Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.”

Analisis asosiatif digunakan untuk mencari atau mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel-variabel independen yang terdiri dari Sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah.

3.5.1.6 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur (*Path analysis*) adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan di dalam penelitian. Analisis jalur (*Path analysis*) biasanya menggunakan istilah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dikarenakan ada variabel perantara/*intervening*/variabel mediasi.

Menurut Imam Ghozali (2013:249):

“Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.”

Selain itu menurut Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2014:115):

“Teknik analisis jalur ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 dan X_2 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z .”

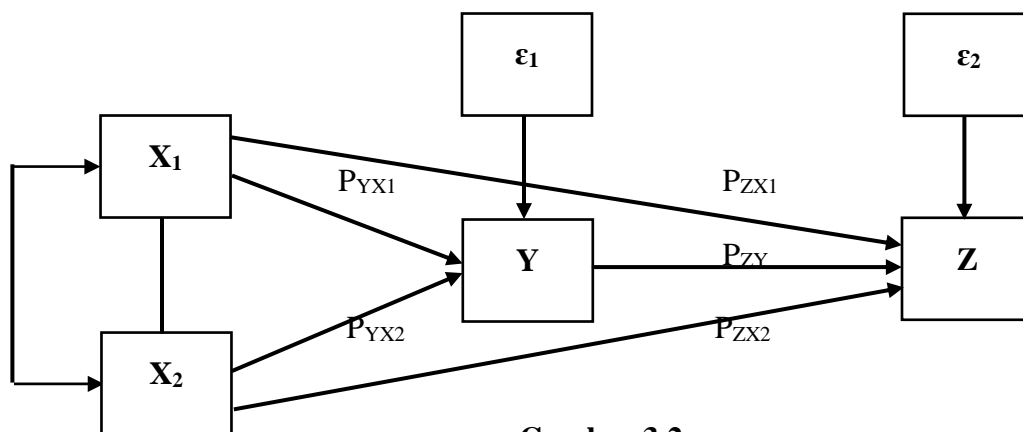
Analisis jalur sendiri tidak menentukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas antar variabel telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Apa yang dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga

atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner.

3.5.1.6.1 Merancang Diagram Jalur

Dalam analisis jalur sebelum penulis melakukan analisis suatu penelitian, terlebih dahulu penulis membuat diagram jalur yang digunakan untuk mempresentasikan permasalahan dalam bentuk gambar yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut.

Langkah pertama yang harus dikerjakan sebelum melakukan analisis jalur adalah merancang diagram jalur sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Berdasarkan judul penelitian, maka model analisis jalur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2
Diagram Jalur

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 3.2 di atas, dapat diformulasikan ke dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y = P_{YX_1}X_1 + P_{YX_2}X_2 + \varepsilon_1$$

$$Z = P_{ZX_1}X_1 + P_{ZX_2}X_2 + P_{ZY}Y + \varepsilon_1$$

Keterangan:

Z = Kinerja Pemerintah Daerah

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

X₁ = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X₂ = Pengawasan Keuangan Daerah

P_{YX₁} = Koefisien jalur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

P_{YX₂} = Koefisien jalur Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

P_{ZY} = Koefisien jalur Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

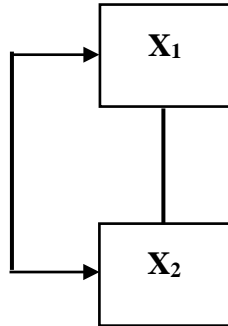
P_{ZX₁} = Koefisien jalur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

P_{ZX₂} = Koefisien jalur Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

ε₁ = Kontribusi variabel lain (*epsilon*)

Selanjutnya dari diagram jalur tersebut, dibuat sub struktur sebagai berikut:

a. Sub struktur 1



Gambar 3.3

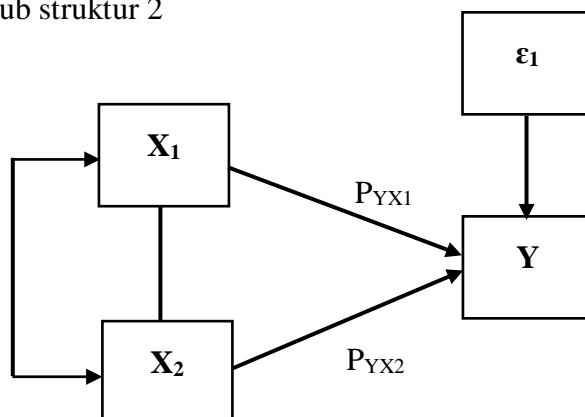
Sub struktur 1: Diagram Jalur Hubungan X₁ dan X₂

Gambar di atas mengisyaratkan bahwa variabel X₁ dan variabel X₂ saling berhubungan. Uji hipotesis tentang hubungan kedua variabel tersebut dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : P_{X_1X_2} = 0$ Tidak terdapat hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah

$H_a : P_{X_1X_2} \neq 0$ Terdapat hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah

b. Sub struktur 2



$$Y = P_{YX_1} X_1 + P_{YX_2} X_2 + \varepsilon_1$$

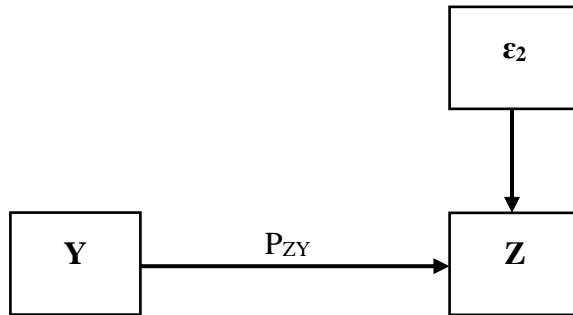
Gambar 3.4

Sub struktur 2: Diagram Jalur Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

Gambar di atas mengisyaratkan bahwa variabel Y dapat dipengaruhi oleh variabel X_1 dan variabel X_2 juga ada variabel lain yang ikut berpengaruh yang dinyatakan ε_1 (variabel yang tidak diukur atau diteliti). Uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Y dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|---|
| $H_0 : P_{YX_1} = 0$ | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah |
| $H_a : P_{YX_1} \neq 0$ | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah |
| $H_0 : P_{YX_2} = 0$ | Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah |
| $H_a : P_{YX_2} \neq 0$ | Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah |

c. Sub struktur 3



Gambar 3.5

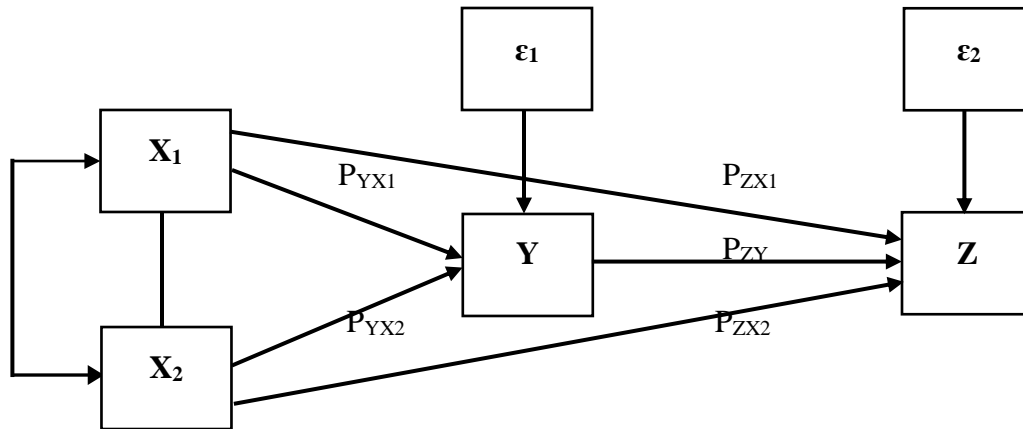
Sub struktur 3: Diagram Jalur Pengaruh Y terhadap Z

Gambar di atas mengisyaratkan bahwa variabel Z dapat dipengaruhi oleh variabel Y juga ada variabel lain yang ikut berpengaruh yang dinyatakan ε_2 (variabel yang tidak diukur atau diteliti). Uji hipotesis tentang pengaruh variabel Y terhadap variabel Z dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : P_{ZY} = 0$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

$H_a : P_{ZY} \neq 0$ Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

d. Sub struktur 4



Gambar 3.6

Sub struktur 4: Diagram Jalur Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y dan Z

Uji hipotesis tentang pengaruh dari masing-masing variabel X_1 dan X_2 terhadap variabel Z melalui variabel Y dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : P_{YX1} \times P_{ZY} = 0$: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

$H_a : P_{YX1} \times P_{ZY} \neq 0$: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

$H_0 : P_{YX2} \times P_{ZY} = 0$: Pengawasan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

$H_a : P_{YX2} \times P_{ZY} \neq 0$: Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

$H_0 : P_{YX1}P_{YX2} \times P_{ZY} = 0$: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

$H_a : P_{YX1}P_{YX2} \times P_{ZY} \neq 0$: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

3.5.1.6.2 Menghitung Koefisien Jalur

Untuk memperoleh nilai koefisien jalur dari masing-masing variabel, terlebih dahulu dihitung korelasi antar variabel menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] \times [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{XY} = Koefisien korelasi

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

Pada dasarnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan $+1$ atau secara sistematis dapat ditulis $-1 < r < +1$.

- a. Bila $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila $0 < r < 1$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
- c. Bila $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dapat dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat digunakan pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

Setelah koefisien korelasi antar variabel dihitung, selanjutnya dihitung koefisien jalur. Namun karena kerumitan dalam perhitungan koefisien jalur, maka penulis menggunakan bantuan *software* SPSS. Dalam pengolahan menggunakan *software* SPSS, koefisien jalur dapat dilihat pada nilai *standardized coefficients*.

3.5.1.6.3 Analisis Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, selanjutnya menghitung koefisien determinasi yaitu digunakan untuk melihat atau mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam presentase (%).

Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

Kriteria analisis koefisien determinasi sebagai berikut:

- a. Jika Kd mendekati 0 (nol), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- b. Jika Kd mendekati 1 (satu), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (*t-test*) dan pengujian secara simultan (*F-test*). Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan variabel-variabel bebas yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan keuangan daerah, serta variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah dan kinerja pemerintah daerah.

3.5.2.1 Pengujian Secara Parsial (*t-test*)

Uji parsial (*t-test*) merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka digunakan statistik uji t. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *software SPSS Statistics* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.

Menurut Sugiyono (2014:250) uji t dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai uji t

r = Nilai koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah sampel yang diobservasi

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima, berarti variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



Gambar 3.7

Daerah penolakan dan penerimaan H_0 uji parsial

3.5.2.2 Pengujian Secara Simultan (*F-test*)

Uji F (*F-test*) adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:257) rumus pengujian sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

F_h = Nilai uji F

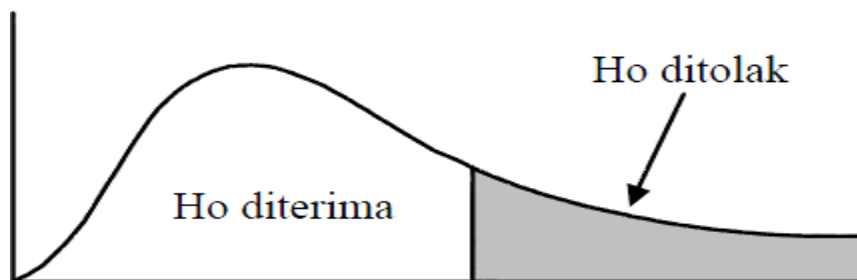
R^2 = Koefisien korelasi berganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

Distribusi uji F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut yaitu k dan $n - k - 1$ dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Untuk uji F, kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, berarti variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak, berarti variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

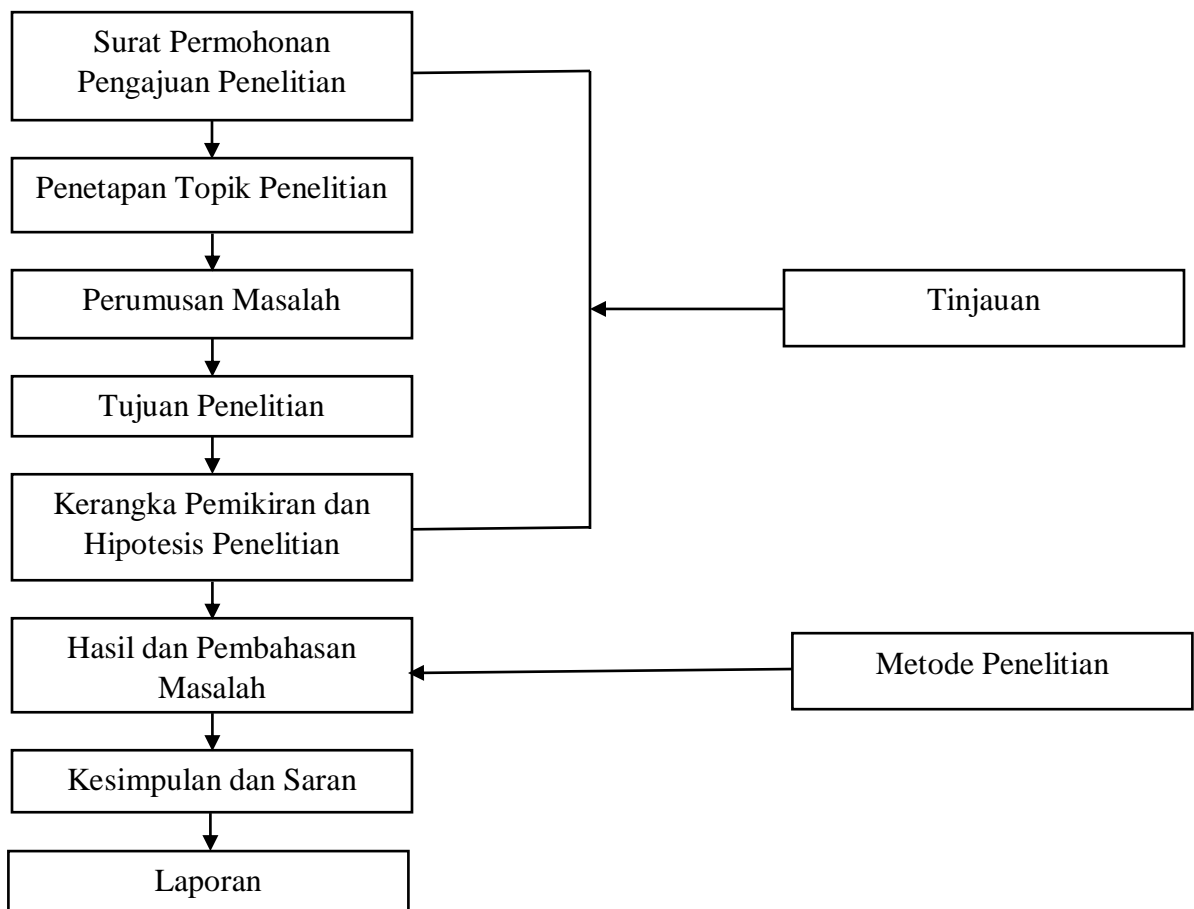


Gambar 3.8

Daerah penolakan dan penerimaan H_0 uji simultan

3.6 Proses Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terencana dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan pemecahan masalah. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam penelitian haruslah tepat dan saling mendukung antara komponen yang satu dengan yang lain. Adapun proses penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.9
Proses Penelitian